

PENGARUH PENERAPAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KANTOR BPKD KABUPATEN BIREUEN)

Jihan Risky Aulia¹, Raida Fuadi*²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

e-mail: jihanriskyaulia@gmail.com¹, raida.fuadi@unsyiah.ac.id^{*2}

* Corresponding Author

<https://dx.doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.20542>

Abstract

This study aims to see and analyze how Value for Money influences the financial management of the Bireuen district government. The population to be studied in this study are all employees at the BPKD office in Bireuen district and for sampling to be used is probability sampling which is a random sampling method. The data analysis method used is multiple linear regression with the help of using the SPSS Version 26 application. Based on the results of the research and discussion that has been carried out, the authors can conclude that Economy, Efficiency, and Effectiveness, simultaneously affect government financial management at the BPKD office in Bireuen Regency. The importance of increasing Value for Money (economy, efficiency, and effectiveness) in order to create quality local government financial management.

Keywords: *Value for Money Concept, Economy, Efficiency, Effectiveness, Public Sector Accounting Management.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, “keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”. Untuk menjalankan kewajiban dan haknya, negara wajib mengelola keuangannya dengan baik serta menjalankan pengelolaan yang baik (*good governance*) sehingga menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik pula. “*Good governance* menurut UNDP (1999), adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara swasta dan masyarakat”.

Konsep *Value for Money (VFM)* ialah suatu langkah dalam melakukan pengukuran kinerja fisik untuk meningkatkan infrastruktur yang didasari, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam artian dalam menggunakannya seminimal mungkin dengan hasil yang dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimized cost*), dan juga efektivitas untuk pemanfaatan efisiensi dalam tercapainya tujuan. Dengan demikian disimpulkan untuk mengukur kinerja dapat menekan biaya dan memaksimalkan hasil agar berkualitas pada mekanisme penganggaran

baik itu secara ekonomi, efisiensi, maupun efektivitas. Dengan adanya *VFM*, dapat membantu instansi sektor publik untuk memperbaiki citra di mata publik dan juga memberikan pemahaman akan pentingnya *public cost awareness* untuk landasan dari implementasi AP. *VFM* juga dapat menolong pemerintah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat agar tepat sasaran sesuai target yang ingin dicapai pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Sifat keagenan muncul karena prinsipal mempekerjakan agen agar dilakukannya pendelegasian wewenang dalam mengambil suatu keputusan terhadap agen tersebut. Oleh karenanya, agen wajib untuk bertanggungjawab atas amanah yang telah dilimpahkan oleh prinsipal kepadanya. Dengan adanya teori agensi ini dapat mempermudah auditor untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan agen dan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Konsep *Value For Money*

Andrianto (2007) mengatakan bahwa “Konsep *VFM* didefinisikan sebagai penghargaan terhadap uang”, artinya setiap rupiah wajib dihargai selayaknya

dan dipergunakan secara baik. Konsep VFM ini merupakan inti dari pengukuran kinerja pada instansi publik. Dalam konsep VFM terdapat konsep pengelolaan instansi sektor publik yang didasari atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

“Ekonomi ialah penilaian relatif, penilaian ekonomi hanya memberikan pertimbangan saran yang digunakan. Terdapat beberapa hal yang bisa dipakai dalam menilai ekonomi yakni biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibanding dengan yang dianggarkan, biaya organisasi yang sesungguhnya lebih besar dibandingkan biaya organisasi yang sejenis, dan penggunaan sumber daya finansial secara optimal” (Mardiasmo, 2002: 133).

“Efisiensi ini merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ingin dicapai” (Mardiasmo, 2021:5). langkah yang bisa dipakai dalam mengukur efisiensi ialah menggunakan rasio antar *output* dengan *input*. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bila *output* yang diberikan lebih besar dari *input*, oleh karena itu semakin tinggi pula tingkat efisiensi pada suatu organisasi.

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Bastian, 2006: 280). Organisasi dikatakan telah efektif apabila telah mencapai tujuannya.

Tuntutan masyarakat dalam VFM ialah ekonomis (hemat) pada pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam artian penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, dan juga efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. “Peranan indikator kinerja pada VFM adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan” (Mardiasmo, 2009: 130).

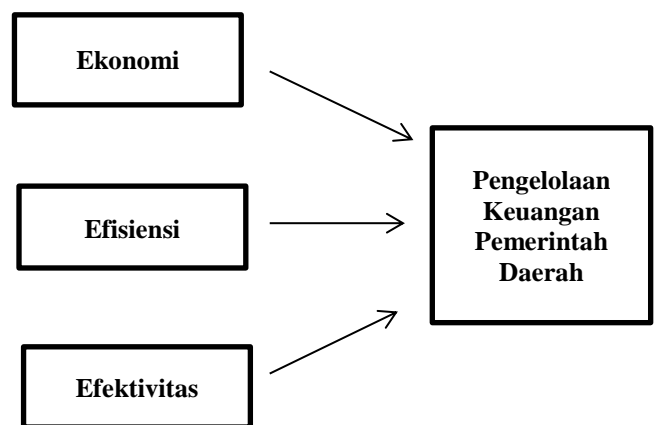
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum (sektor publik) dengan baik. “*Good governance* menurut UNDP (1999), adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara swasta dan masyarakat”.

Dalam mengelola keuangan pemerintah daerah, *good governance* menjadi alternatif dalam

menjalankan pemerintahan. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan Negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyebutkan “pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan”.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi akan yang diteliti meliputi semua Pegawai kantor BPKD kab. Bireuen sebanyak 115 orang yang terdiri dari atas sekretariat sebanyak 23 orang, bidang anggaran yang terdiri atas 9 orang, bidang penetapan PAD yang terdiri atas 15 orang, bidang penagihan PAD yang terdiri atas 27 orang, bidang perbendaharaan yang terdiri atas 20 orang, bidang aset daerah yang terdiri atas 14 orang, dan bidang akuntansi yang terdiri atas 7 orang. Adapun metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis regresi berganda dikarenakan variabel independen yang dipakai lebih dari satu. Data diolah menggunakan bantuan SPSS (*Statistic Package for Social Scienced*). Penelitian dilakukan pada kantor BPKD kab. Bireuen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini melingkupi jenis kelamin, golongan, usia serta pendidikan terakhir, karakteristik responden secara jelas pada tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik Responden Penelitian

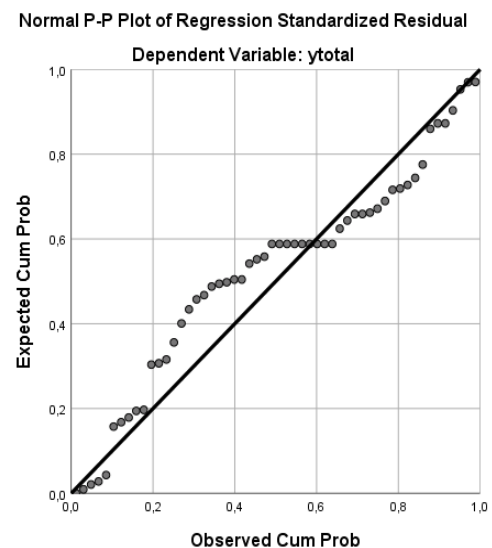
No.	Karakteristik Responden	Jumlah	Frekuensi
1	Jenis Kelamin		
	Perempuan	33	61,1%
	Laki-laki	21	38,9%
	Total	54	
2	Golongan		
	Golongan I	2	3,7%
	Golongan II	12	22,2%
	Golongan III	36	66,7%
	Golongan IV	4	7,4%
	Total	54	
3	Usia		
	<30 Tahun	31	57,4%
	31 – 40 Tahun	9	16,7%
	41 – 50 Tahun	13	24,0%
	>50 Tahun	1	1,9%
	Total	54	
4	Pendidikan Terakhir		
	SMA	8	14,8%
	Diploma	4	7,4%
	Sarjana	40	74,1%
	Magister	2	3,7%
	Doktor	0	0%
	Total	54	

Sumber: Data diolah (2022)

Pada Tabel 1. terlihat bahwa untuk jenis kelamin terbanyak merespon ialah perempuan berjumlah 33 orang (61,1%). Untuk golongan yang paling banyak merespon ialah golongan III dengan jumlah 36 orang (66,7%) dan untuk responden yang paling sedikit ialah golongan I dengan jumlah 2 orang (3,7%). Untuk usia, responden yang paling banyak dengan usia < 30 thn berjumlah 31 orang (57,4%) yang responden paling sedikit dengan umur >50 thn berjumlah 1 orang (1,9%). Untuk pendidikan, responden paling banyak ialah sarjana dengan jumlah 40 orang (74,1%) dan responden paling sedikit ialah doktor dengan jumlah 0 orang (0%).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas

Terlihat dalam grafik *normal probability plot* yang mana pada data (titik) yang tersebar di sekitar

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, oleh karenanya model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil dari pengujian multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ekonomi	,562	1,780
	Efisiensi	,571	1,750
	Efektifitas	,560	1,784

Sumber: SPSS 26 (2022)

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 2 nilai *tolerance* dan VIF yang terdapat pada variabel ekonomi sebesar 0,562 > 0,10 dan 1,780 < 10. Variabel efisiensi sebesar 0,571 > 0,10 dan 1,750 < 10. Variabel efektivitas sebesar 0,560 > 0,10 dan 1,784 < 10. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,594	5,859		1,638	,108
	X1	2,163	,510	,533	4,240	,000
	X2	,945	,432	,273	2,190	,033
	X3	,114	,533	,027	2,214	,038

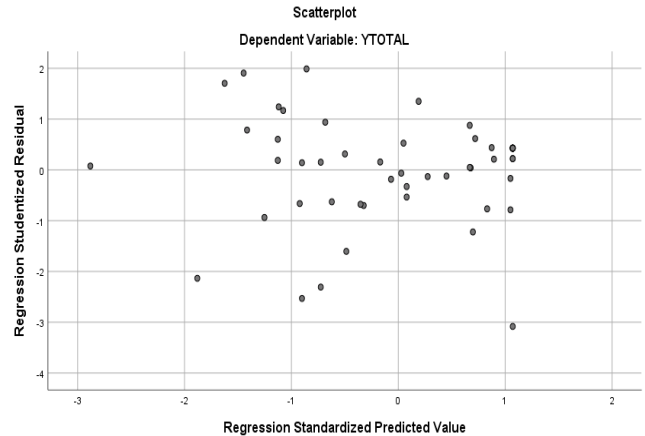
Sumber: SPSS 26 (2022)

Persamaan yang diperoleh adalah :

$$Y = 9,594 + 2,163X_1 + 0,945X_2 + 0,114X_3 + e$$

Dari persamaan regresi diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai konstannya adalah sebesar 9,594. Apabila ekonomi (X₁) nilainya adalah 0 maka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) meningkat sebesar 9,594. Nilai konstanta 9,594 juga memberikan penjelasan bahwa ketiga variabel bebas tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2022)

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 3, terlihat bahwa titik-titik tidak terbentuk pola yang jelas dan tersebar di bawah dan atas 0 pada sumbu Y. Hasilnya dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil Metode Analisis Regresi

Hasil analisis regresi linear berganda dapat kita lihat dari tabel 3.

mempengaruhi pengelolaan KPD sebesar kelipatan 9,594.

Ekonomi (X₁) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 2,163 artinya bahwa setiap kenaikan Ekonomi (X₁) akan mengakibatkan meningkatkan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Y) sebesar 2,163. Efisiensi (X₂) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,945 artinya bahwa setiap kenaikan Efisiensi (X₂) akan mengakibatkan meningkatkan Pengelolaan

Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Y) sebesar 0,945. Efektifitas (X_3) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,114 artinya bahwa setiap kenaikan Ekonomi (X_1) akan mengakibatkan meningkatkan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Y) sebesar 0,114.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan demi mengetahui sejauh mana model regresi mampu untuk menjelaskan variasi dari variabel terikat. *Result* nya dapat terlihat di tabel 4 dibawah ini secara detail.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,745 ^a	,556	,529	4,95590

Sumber: SPSS 26 (2022)

Dari tabel 4, nilai *R square* sebanyak $0,556 \times 100 = 55,6\%$. Artinya variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep VFM mampu menjelaskan variabel Pengelolaan KPD yaitu sebesar 55,6% dan sisa 44,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Tabel 6 Hasil Pengujian Secara Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,594	5,859		1,638	,108
	X1	2,163	,510	,533	4,240	,000
	X2	,945	,432	,273	2,190	,033
	X3	,114	,533	,027	2,214	,038

Sumber: SPSS 26 (2022)

Interpretasi hasil pengujian adalah sebagai berikut:

1) Dengan adanya hasil pengujian statistik yang telah dilakukan diatas, terlihat t_{hitung} daripada variabel ekonomi (X_1) adalah sebesar 4,240 dan nilai t_{tabel} 1,67. Dengan demikian dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak yang artinya Ekonomi (X_1) berpengaruh

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dari pengujian secara simultan dapat terlihat secara jelas di tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji Pengujian Secara Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1535,453	3	511,818	20,839	,000 ^b
	Residual	1228,047	50	24,561		
	Total	2763,500	53			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2022)

Nilai F tabel dalam penelitian ini sebesar 2,77. Berdasarkan hasil analisis pada uji F diketahui nilai $F_{hitung} 20,839 > F_{tabel} 2,77$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, dengan kata lain secara simultan atau secara bersama-sama variabel ekonomi, efisiensi, dan efektifitas berpengaruh terhadap pengelolaan KPD pada kantor BPKD kab. Bireuen.

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Tabel 6 menjelaskan hasil dari pengujian secara parsial.

terhadap pengelolaan KPD (Y) pada kantor BPKD kabupaten Bireuen.

2) Dengan adanya hasil pengujian yang telah dilakukan, terlihat t_{hitung} daripada variabel efisiensi (X_2) adalah sebesar 2,190 dan nilai t_{tabel} 1,67. Dengan demikian dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak yang artinya Efisiensi (X_2) berpengaruh terhadap

pengelolaan KPD (Y) pada kantor BPKD kabupaten Bireuen.

- 3) Dengan adanya hasil pengujian statistik diatas, terlihat bahwa t_{hitung} pada variabel efektivitas (X_3) adalah sebesar 2,214 dan nilai t_{tabel} 1,67. Dengan demikian dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak yang artinya Efektifitas (X_3) berpengaruh terhadap pengelolaan KPD (Y) pada kantor BPKD kabupaten Bireuen.

Pembahasan

Pengaruh Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai F hitung sebesar 20,839 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih rendah daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa dijumpai pengaruh secara simultan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas terhadap pengelolaan KPD.

Pengaruh Ekonomi terhadap Pengelolaan KPD

Pengujian regresi untuk hipotesis kedua pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ekonomi berpengaruh terhadap Pengelolaan KPD. Hasil uji menunjukkan nilai koefisien regresi variabel ekonomi (X_1) sebesar $\beta_1 = 2,163$ dengan signifikansi sebesar 0,000. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jika $sig < 0,05$ maka H_a diterima, yaitu ekonomi berpengaruh terhadap pengelolaan KPD pada BPKD di Kabupaten Bireuen.

Hasil penelitian ini selaras dengan Saskia et. al (2020), Septariani (2016) yang menyimpulkan bahwa ekonomi mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Efisiensi Terhadap Pengelolaan KPD

Dari uji regresi pada hipotesis ketiga dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah efisien berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi variabel efisiensi (X_2) sebesar $\beta_1 = 0,945$ dengan signifikansi sebesar 0,033. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jika $sig < 0,05$ maka H_a diterima, yaitu efisiensi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD di Kabupaten Bireuen". Koefisien regresi efisiensi adalah sebesar 0,945. Hal ini juga

menunjukkan bahwa efisiensi sudah menghasilkan Pengelolaan KPD yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan Saskia et al. (2020), Septariani (2016) yang menyimpulkan bahwa efisiensi mempengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Efektivitas terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis keempat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah efektifitas berpengaruh terhadap Pengelolaan KPD. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi variabel efektifitas (X_3) sebesar $\beta_1 = 0,114$ dengan signifikansi sebesar 0,038. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jika $sig < 0,05$ maka H_a diterima, yaitu efektifitas berpengaruh terhadap Pengelolaan KPD pada BPKD di Kabupaten Bireuen.

Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan yang diantaranya:

1. Ekonomi, efisiensi, dan efektifitas berpengaruh secara simultan pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kantor BPKD kab. Bireuen.
2. Ekonomi berpengaruh positif pada pengelolaan KPD di kantor BPKD kab. Bireuen.
3. Efisiensi berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kantor BPKD kabupaten Bireuen.
4. Efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kantor BPKD kabupaten Bireuen.

Merujuk pada penelitian disarankan bahwa penelitian ini dapat:

1. Bermanfaat dan dapat meningkatkan pengelolaan KPD.
2. Pentingnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, agar terciptanya pengelolaan KPD yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Arifani, C., Salle, A., & Rante, A. (2018). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS VALUE FOR MONEY. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13(1), 68-82.
- Agus, S. (2001). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi edisi ke empat*. Yogyakarta: BEF.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches. Third Edition*. United States of America: SAGE Publications Ltd.
- Jensen, M. C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*. 3, 305-360.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16-28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Sulistioni, G. (2003). *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: Somasi.